

WIDYA AKSARA

Jurnal Agama Hindu

Volume 28 Nomor 2 September 2023

STRATEGI MENGGALANG *PUNIA* UMAT HINDU KOTA SEMARANG

STRATEGY FOR GATHERING PUNIA HINDU PEOPLE IN SEMARANG CITY

Sujaelanto

Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah
sujaelanto@gmail.com

ABSTRAK

Di jaman sekarang ini, *Punia* bagi umat Hindu merupakan kegiatan sosial yang mencerminkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap kebutuhan pihak lain. Atas kepedulian tersebut, umat Hindu menyumbangkan secara sukarela sebagian dari hartanya untuk kepentingan sosial yang lebih luas dari pada kepentingannya sendiri. *Punia* dilakukan untuk kelompok atau individu yang membutuhkan atau kurang mampu, tetapi juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan social keagamaan dan atau dalam membangun tempat social keagamaan. Itulah sebabnya ajaran Hindu memandang dan mendudukan kegiatan *Punia* selalu bernilai sosial tinggi. Di satu sisi *Punia* bermanfaat bagi pihak lain, di sisi lain bermanfaat bagi pihak pemberi *Punia* sebagai pengendalian diri dari keserakahan. Sasaran dalam tulisan ini adalah strategi penggalangan kegiatan *Punia* dalam masyarakat Hindu di Kota Semarang.

Dalam tulisan ini bagaimana umat Hindu di Kota Semarang menggali *Punia* untuk pembangunan pura dan upacara ritual ? Permasalahan tersebut dianalisis dan dijelaskan dengan menerapkan teori hegemoni dan Semiotika. Berdasarkan analisis diperoleh gambaran bahwa penggalangan *Punia* dapat dilakukan melalui iuran wajib anggota *tempek*, pengajuan proposal, sesari banten, kotak *Punia* di pura, retribusi, kupon berhadiah, *Dana Punia* spontan, dan sistem lelang. Strategi *Punia* untuk pembangunan pura terkait dengan kontruksi sosial, yaitu pura sebagai kontrol sosial, pemersatu umat Hindu, pura simbol *sradha* bakti, dan kesucian dalam kebangkitan kesradaan. Analisis tersebut menegaskan, bahwa *Punia* bukan sekedar pemenuhan terhadap hasrat manusia sebagai makhluk social yang terikat dalam kelompok. Sebaliknya *Punia* justru membangun kesadaran spiritual agar manusia dapat menyeimbangkan kebutuhan dunia materi dan non materi. Keseimbangan diperlukan untuk mengantisipasi anomali sosial dan moral demi terangkatnya tanggung jawab manusia terhadap spirit kehidupan sosial dalam multi dimensi.

Kata Kunci : *Punia*, Simbol Religius, Umat Hindu Kota Semarang.

ABSTRACT

In this day and age, Punia for Hindus is a social activity that reflects attitudes and behavior that care about the needs of other parties. Due to this concern, Hindus voluntarily donate part of their wealth for social interests that are wider than their own interests. Punia is carried out for groups or individuals who are in need or less fortunate, but it is also carried out as an effort to fulfill the needs of social religious activities and/or in building social

religious places. That is why Hindu teachings view and place Punia activities as always having high social value. On the one hand, Punia is beneficial for other parties, on the other hand, it is beneficial for the party giving the Punia as self-control from greed. The target in this paper is a strategy to encourage Punia activities in the Hindu community in the city of Semarang.

*In this article, how do Hindus in the city of Semarang dig up Punia for the construction of temples and ritual ceremonies? This problem is analyzed and explained by applying the theory of hegemony and semiotics. Based on the analysis, it is clear that Punia raising can be done through mandatory temple member fees, submitting proposals, offering donations, Punia boxes at temples, levies, prize coupons, spontaneous Punia funds, and an auction system. Punia's strategy for building temples is related to social construction, namely temples as social control, unifying Hindus, temples as symbols of *sraddha* devotion, and purity in awakening consciousness. This analysis confirms that Punia is not just a fulfillment of human desires as social creatures bound in groups. On the contrary, Punia actually builds spiritual awareness so that humans can balance the needs of the material and non-material worlds. Balance is needed to anticipate social and moral anomalies in order to increase human responsibility towards the spirit of social life in multi-dimensional areas.*

Keywords : Punia, Religious Symbol, Hindus of Semarang City.

I. PENDAHULUAN

Semarang memiliki karakteristik tersendiri dengan kota-kota yang ada di Jawa Tengah dalam pembangunan agama. Kegiatan keagamaan Hindu kota Semarang mengikuti sifat dan karakteristik masyarakat metropolitan yang hiruk pikuk dengan kegiatannya. Pembangunan pura dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu yang cukup lama karena terdapat kendala pendanaan. Begitu juga pembangunan sarana social keagamaan Hindu lainnya di Kota Semarang juga mengalami nasib yang sama.

Kota Semarang memiliki lima pura, pertama pura Agung Girinatha yang berlokasi di jalan Sumbing Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur yang dijadikan pusat kegiatan Hindu center Kota Semarang karena keberadaan pura yang megah yang dibangun dengan arsitek khas Bali serta berlokasi yang strategis dengan daya tarik pemandangan diatas bukit sehingga dapat melihat hamparan kota Semarang dengan berbagai bangunan gedung bertingkat serta dapat melihat landing dan take out lalu lalang pesawat terbang di bandara internasional Ahmad Yani. Keistimewaan lain pura Agung Giri Natha juga digunakan aktifitasnya kegiatan keagamaan Hindu setiap hari Minggu yang dimanjakan dengan makanan kuliner khas Bali seperti babi guling, lawar, sromotan, tipat canthok serta prenak prenik kebutuhan sarana upacara sehingga keberadaan pura Agung Giri Natha tiada sepi. Penyungsong (pengusung, jemaat) pura ini adalah umat Hindu dari wilayah Semarang Barat dan Selatan.

Kedua adalah pura Amertasari yang berlokasi di jalan Udan Riris perumahan Tlogosari dengan gaya bangunan arsitek khas Bali, penyungsong pura ini adalah umat Hindu wilayah Semarang bagian Timur serta umat Hindu dari Kabupaten Demak. Ketiga pura Saraswati yang berlokasi di Akademi Kepolisian yang digunakan untuk aktifitas keagamaan Hindu bagi taruna yang beragama Hindu. Ke empat pura Satya Dharma yang berlokasi di Desa Ngadirgo Kecamatan Mijen yang di usung umat Hindu wilayah kecamatan Mijen. Kelima pura Buana Mandala yang berlokasi di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Pura dengan segala ritualnya memerlukan biaya yang cukup besar. Apabila dilihat dari kuantitas warga Hindu yang hanya berjumlah sekitar lima ribu lima ratus jiwa, dapat

dikatakan di Kota Semarang memiliki prestasi besar dalam upaya mewujudkan bangunan pura yang termegah di Jawa Tengah beserta dengan kegiatan ritualnya. Proses penggalangan *Punia* untuk kegiatan social keagamaan lainnya di Kota Semarang di satu sisi menunjukkan adanya kesulitan, meskipun mereka yakin dapat menyelesaikan. Begitu juga pada saat penggalangan *Punia* untuk upacara *Mlaspas*, *Ngenteg Linggih* atau *piodalan*, proses pengumpulan *Punia* umat berlangsung lebih cepat. Pengumpulan *Punia* untuk kegiatan keagamaan lain seperti pembangunan pasraman, organisasi pemuda Hindu, organisasi wanita Hindu, bantuan siswa Hindu miskin dan bahkan penggalangan *Punia* untuk pembinaan umat terdapat kecenderungan yang berbeda.

Kedua fenomena tersebut menunjukkan adanya gejala sosial religius bagi Umat Hindu di Kota Semarang, sekalipun substansi dan esensi religiusitasnya berbeda, bahkan terdapat indikasi adanya sikap umat yang bersifat paradoks atau berlawanan sekalipun tidak bertentangan. Dalam kasus ini pengumpulan *Punia* yang lebih cepat merupakan sikap antusiasme umat untuk menunjukkan dimensi ritualistik yang lebih besar dan serentak dalam upaya membangun sakralitas. Sikap ritualistik umat seperti itu, sekilas tampak irasional apabila dikaitkan dengan kondisi social ekonomi. Akan tetapi aspek irasionalitas ini mungkin tidak seluruhnya benar.

Umat Hindu di Kota Semarang dengan setting dan situasi tingkat perekonomian mereka yang beraneka ragam, pasti memiliki alasan yang beragam dan juga bersifat rasional di balik antusiasme ritualistik itu dalam penggalangan *Punia* untuk kepentingan pelaksanaan upacara ritual keagamaan. Terkait dengan fenomena tersebut, Agus (2006) mengatakan, bahwa ada tatacara perlakuan terhadap sesuatu yang di sakralkan. Ada upacara keagamaan yang berhadapan dengan yang sakral. Upacara dan perlakuan khusus ini tidak sepenuhnya dapat dipahami berdasarkan alasan-alasan ekonomi dan rasional.

Frans Magnis Suseno menyampaikan pandangan yang setara dengan pandangan Agus mengenai upacara ritual. Menurut Suseno (2006:28) upacara ritual adalah tatacara sebelum agama besar itu mengklaimnya. Sejak semula suku-suku asli percaya pada satu Tuhan, pada penghayatan keagamaan asli itu, seluruh alam diresapi oleh kekuatan-kekuatan gaib yang tidak kelihatan. Kekuatan-kekuatan itu, ada yang melindungi desa, ada pula yang mengancam. Melalui sesaji, ritus, dan doa-doa, dengan memperlihatkan berbagai pantangan, dan dengan mengatur seluruh cara hidup dalam kesucian dan kepercayaan bersama, orang berusaha untuk hidup aman. Antara realitas alami, realitas sosial (masyarakat), dan adi-duniawi menyatu. Dalam tulisan ini membedah fenomeana bagaimana umat Hindu kota Semarang mengupayakan *Punia* untuk pembangunan pura dan upacara ritual ? Permasalahan tersebut dianalisis dan dijelaskan dengan menerapkan teori hegemoni dan Semiotika.

II. PEMBAHASAN

1 Peranan Organisasi Keagamaan Hindu dalam Penggalangan Dana *Punia*

Kota Semarang terdiri 16 kecamatan dan 177 kelurahan dan sebagai kota metropolitan dihuni berbagai penganut agama yang didalamnya terdapat agama Hindu. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa dan Bali. Meskipun jumlah mereka berbeda jauh dengan penganut agama besar lain, namun aktivitas keagamaan mereka dapat dilakukan secara hidmat sesuai dengan tradisi ritualistik masyarakat Hindu yang diselenggarakan di berbagai tempat pura. Umat Hindu di Kota Semarang yang tersebar di tiap-tiap kecamatan terdiri dari tiga etnis yakni etnis Jawa yang berdomisili di wilayah Mijen dan sekitarnya, etnis India berdomisili di perkotaan dan etnis dari Bali menyebar diseluruh wilayah kota Semarang. Umat Hindu dari Bali memiliki sifat dan karakteristik sosial kemasyarakatan dengan membentuk komunitas seperti *tempek* di Bali. Tetapi

masyarakat Hindu dari Jawa dan India tidak membentuk organisasi social kemasyarakatan seperti *tempek* yang ada di Bali. Konsep *tempek* tidak begitu populer di wilayah Semarang, hal ini disebabkan karena umat Hindu Semarang juga berasal dari etnis Jawa yang mungkin bagi mereka etnis Jawa kata *tempek* memiliki arti yang berbeda. Sehingga komunitas Hindu Semarang lebih cenderung dengan menggunakan istilah *wilayah umat*.

Secara system social kemasyarakatan Hindu, pembagian *wilayah umat* meliputi wilayah umat Hindu Semarang Timur dengan jumlah 89 kepala keluarga, wilayah umat Hindu Semarang Barat dengan jumlah 51 kepala keluarga dan wilayah umat Hindu Semarang Selatan dengan jumlah 66 kepala keluarga. Selain system social kemasyarakatan Hindu yang tergabung dalam kelompok wilayah masih terdapat beberapa umat yang membentuk komunitas tersendiri seperti komunitas Hindu dari Jawa yang derdomisili di Kecamatan Mijen dan sekitarnya serta komunitas Hindu dari India. Struktur organisasi social kemasyarakatan Hindu di kota Semarang yang berbentuk wilayah sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki susunan kepengurusan Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang mengelola jalannya organisasi.

Organisasi kemasyarakatan Hindu (*tempek*) di bawah pengendalian Parisada tingkat kota memiliki fungsi untuk pembinaan dan penghubung kepada umat yang berakaitan dengan kegiatan keagamaan seperti piodalan, masalah pembangunan pura maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan agama Hindu. Organisasi keagamaan Hindu tidak saja *tempek*, tetapi masih ada beberapa organisasi keagamaan Hindu lainnya yang ada di Semarang. ada yang sifatnya local maupun keberadaannya nasional. Organisasi keagamaan yang bersifat local seperti Kesatuan Mahasiswa Hindu Semarang, Pasraman Brahmawidya, Pesantian Merdu Kumala, Paguyuban Hindu Satya Dharma, Lembaga Pembinaan Umat.

Organisasi keagamaan Hindu yang memiliki tingkat kepengurusan secara hirarkis mulai tingkat nasional hingga regional adalah Parisada, Badan Penyiaran Hindu, Pinandita Sanggraha Nusantara Jawa Tengah. Lembaga Pengembangan Dharmagita Jawa Tengah. Sarati Banten, Wanita Hindu Dharma Indonesia. Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Badan Pendidikan Hindut, Lembaga Artha, Badan Dharma Dana Nasional. Namun disayangkan tidak semua organisasi keagamaan tersebut tidak mampu mengkases organisasinya pada tingkat kota, artinya hanya berada pada tingkat provinsi. Bahkan organisasi keagamaan yang terakhir (Badan Dharma Dana Nasional) tidak terdapat ditingkat provinsi. Padahal organisasi keagamaan tersebut yang paling berperan dalam urusan *Dana Punia*.

Parisada sebagai leanding sector yang menggerakkan organisasi keagamaan Hindu sebenarnya memiliki legimitasi untuk membentuk organisasi keagamaan tersebut. Tidak terbentuknya Badan Dharma Dana Nasional kota Semarang hingga kecamatan menimbulkan suatu pertanyaan pada diri kita. Mengapa kita tidak bisa membentuk? Jawaban secara klasik adalah karena keterbatasan sumber daya manusia dan dana operasional. Kurangnya dukungan terhadap lembaga ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan penjelasan yang benar tentang lembaga ini dan penerapan manajemen yang belum sistemik dan transparan. Akibat dari itu, Media Hindu juga menyitir, bahwa *Punia* yang dihimpun melalui Badan Dharma Dana Nasional tidak mencapai angka ratusan juta. Lembaga agama Hindu (parisada) dalam rangka menggalang *Punia* kepada umat dengan melalui jalur hirarkis seperti mendirikan Badan Dharma Dana Nasional baik ditingkat provinsi ataupun kota belum mendapat respon yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi. Lembaga Artha yang pernah

dibentuk oleh Parisada untuk menghimpun *Dana Punia* sudah hilang gaungnya, karena kurang mendapat dukungan serius oleh umat (Majalah Raditya 6 Sempetmber 2002).

Kurang gaungnya lembaga ini berdampak pula di Kota Semarang yang berujung belum terbentuk Badan Dharma Dana Nasional tingkat Kota. Hal ini tentunya mengingatkan keberadaan kita tentang Lembaga *Dana Punia* (Badan Dharma Dana Nasional), walaupun sudah ditetapkan pengakuannya oleh Parisada, tetapi karena sosialisasi sehingga belum bisa mengumpulkan *Dana Punia* sesuai yang diharapkan. Sehingga masyarakat Hindu Kota Semarang diperkenankan untuk penggalangan *Punia* sesuai dengan kemampuan umat di wilayah tersebut.

Penggalangan *Dana Punia* sudah dihimbau oleh Parisada dalam Ketetapan Mahasabha no IV/Tap/M.Sabha/1980 tentang Tata Kemasyarakatan, di bagian d disebutkan untuk mendukung dan menunjang semua kegiatan oleh karena itu penggalian dana dari segala sumber secara syah juga perlu digalakan . penggalangan dana tersebut dapat digolongka menjadi beberapa golongan yakni dana dari umat, dana dari pemerintah.(Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2005.67-68). Penggalangan *Dana Punia* sebagai upaya untuk kelancaran suatu kegiatan agama menjadikan tantangan bagi umat Hindu khususnya umat Hindu kota Semarang. Penggalangan *Dana Punia* yang telah diisyaratkan dalam keputusan mahasabha yang merupakan keputusan hukum umat Hindu Indonesia dipertegas lagi dalam Bhisama Sabha Pandita no 01Bhisama/SabhaPandita Parisada Pusat/X/ 2002 tentang *Dana Punia* dan Keputusan Pesamaan Agung no. 010/Kep/P.A/ Parisada/VII/ 2005 tentang Dharma Dana Nasional.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Parisada sebenarnya merupakan langkah maju dalam rangka menggalang *Dana Punia* sebagai sumber utama kegiatan keagamaan. Agama Hindu memiliki kegiatan ritual agama yang cukup banyak sehingga perlu adanya upaya menggali dana dan menghimpun dana menjadi Dana abadi untuk keperluan ritual maupun kegiatan keagamaan lainnya. Penggalian dan penggunaan *Dana Punia* memerlukan metoda dan menejemen yang tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga tahun 2006 Parisada mengeluarkan Ketetapan Maha Sabha no IV/Tap/M. Sabha IX/2006 tentang Dharma Dana Nasional pada bagian kedua “menugaskan kepada pengurus harian parisada pusat untuk mensosialisasikan Dharma Dana Nasional ini keseluruh umat Hindu melalui parisada provinsi dan kabupaten/kota. Di bagian ketiga menyebutkan “menugaskan kepada pengurus harian parisada pusat untuk membentuk Badan Dharma Dana Nasional yang menjalankan mekanisme dalam pengumpulan, penyimpanan, menetapkan peruntukan dan mengelola Dharma Dana Nasional sebagai kelanjutandari setiap keputusan parisada Hindu Dharma Indonesia sebelumnya” (Parisada.2006.108).

Penggalangan *Dana Punia* secara structural merupakan impian bagi umat Hindu kota Semarang. Tidak ada akses untuk melegitimit termasuk lembaga tinggi agama Hindu. Akses menuju birokrasi dalam menggalang *Dana Punia* mengalami jalan buntu. Tidak berjalannya system Badan Dharma Dana nasional merupakan permasalahan yang berkaitan dengan arus politik kekuasaan. Hubungan antara politik dan agama biasanya muncul pada bangsa-bangsa yang tidak homogeny secara agama. Para pemikir politik klasik seperti Aristoteles menegaskan bahwa homogenitas agama adalah suatu kestabilan politik. Apabila kepercayaan-kepercayaan yang berlawanan mengenai nilai-nilai tinggi (ultimate value) masuk dalam arena politik mereka makin jauh dari kompromi (Alford.dalam Roland Robertson.1995.379). pengaruh kuat arus politik berokerstra dengan kelompok agama mayoritas dapat menyulap kondisi yang semakin menjadi kelompok minoritas kurang mendapat pelayan dan hak yang sama. Dalam kehidupan Negara yang agama masyoritas tentunya hak-hak pelayanan agama semakin terbelakang, tidak memiliki kompromi.

Penggalangan dana dalam kelompok agama mayoritas sudah tersistem dan melembaga melalui badan atau birokrasi.

Jalan yang dibangun parisada untuk membentuk jaringan *Dana Punia* melalui jalur formal dengan pemerintah tidak kunjung datang. Padahal tegas dalam amanat keputusan Mahasabha IX no IV/Tap.M.Sabha IX/2006 tentang petunjuk teknis mekanisme penyelenggaraan dharma dana nasional . Petunjuk teknis ini tidak mampu menembus kancuh pergulatan dalam penggalangan dana karena arus politik dan peraturan lain tidak mendukung. Sehingga umat Hindu kota Semarang dalam penggalangan *Dana Punia* secara organisasi keagamaan teradopsi melalui kelompok sesuai wilayah umat seperti tersebut di atas.

Penggalangan *Dana Punia* melalui kelompok *wilayah umat* yang di organisisir oleh Parisada wilayah masing-masing merupakan terobosan dan kurang mencerminkan system organisasi keagamaan Hindu masih tumpul dalam penggalangan *Dana Punia* yang semestinya digerakan oleh Badan Dharma Dana Nasional tingkat kota. Namun lembaga ini ternyata belum terbentuk pada tingkat provinsi, apakah hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau mungkin adanya hambatan dari system yang ada dalam lembaga tersebut, tentunya untuk menggali lebih jauh tentang lembaga ini perlu penelitian lebih lanjut.

Tidak berfungsinya Badan Dharma Dana Nasional tingkat kota, tidak menyurutkan semangat dan strategi umat Hindu kota Semarang dalam upaya penggalangan *Dana Punia* guna memenuhi kebutuhan kegiatan ritual / upacara keagamaan maupun kegiatan keagamaan yang harus berjalan sesuai program dan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan- kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara internal maupun eksternal akan menguras dana yang cukup besar, sehingga umat Hindu kota Semarang melakukan langkah langkah strategis dalam penggalian *Dana Punia*.

2 Strategi *Dana Punia* Umat Hindu Kota Semarang

Penggalangan *Dana Punia* selama ini mengalami banyak permasalahan. Beberapa di antaranya adalah keidakpercayaan pemberi *Dana Punia* terhadap pengelola *Dana Punia*, ketiadaan dana yang cukup untuk ber*Dana Punia* pada saat itu, dan kemungkinan pihak yang dimintai *Dana Punia* adalah kurang menyadari pentingnya *Dana Punia* terhadap berbagai keperluan pihak-pihak lain, baik kelompok maupun individu. Kemungkinan lain, bahwa yang bersangkutan tergolong orang yang berpandangan sekuler yang kurang percaya pada ajaran agama.

Pengaruh jaman Kaliyoga yang cenderung bahwa seseorang lebih banyak diperbudak oleh materi atau mungkin keberadaan ekonomi. Seperti umat Hindu Mijen yang keberadaan ekonomi sebagian besar kurang menguntungkan, memang agak tersendat dalam melakukan *Punia*. Pada jaman Kali Yoga , sastra agama (dharma sastra) menyiratkan bahwa jaman sekarang ini manusia cenderung diperbudak oleh harta. Hal itu dinyatakan secara tegas dalam Kakawin Nitisastra sargah IV.7 yang berbunyi sebagai berikut.

Singgih yan tekaning yugan ta kali tan hana lewiha saking mahadana. Tan waktan guna sura pandita widagdha pada mengayap ing dhanaiswara.

Artinya ; Sesungguhnya bila jaman kali datang pada akhir yuga, hanya kekayaan yang dihargai. Tidak perlu dikatakan lagi bahwa orang yang saleh dan orang yang pandai akan mengabdikan kepada orang kaya.

Dengan demikian untuk penggalangan *Dana Punia* perlu adanya upaya upaya tertentu. Salah satunya digali melalui kegiatan organisasi-organisasi sosial masyarakat

Hindu. Berdasarkan kesulitan-kesulitan tersebut, maka para pengumpul *Dana Punia* bagi umat Hindu di Kota Semarang menggunakan beberapa strategi, agar pengumpulan *Dana Punia* sukses. Adapun strategi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1) *Dana Punia* Melalui Iuran Wajib Anggota Wilayah Umat.

Punia merupakan suatu bentuk aktivitas sosial berupa pemberian sumbangan materi tertentu secara ikhlas. Dengan kata lain, bahwa *Punia* selalu berorientasi pada pemberian yang tidak terikat dalam bentuk paksaan. Ketidak-terpaksaan itulah yang dibahasakan dengan istilah tulus ikhlas atau *lascarya*. Namun demikian, seiring dengan perubahan zaman yang tiada terbendung, maka pemahaman masyarakat mengenai apa yang dikategorikan sebagai sederhana, sedang, dan utama yang dalam kategori pelaksanaan upacara ritual Hindu disebut *nista*, *madya*, *utama* sangat bergantung pada perubahan situasi sosial pada zamannya.

Dalam mengatasi terhambatnya pelaksanaan *Dana Punia*, sehingga masyarakat kota Semarang melalui jalur alternative sebagai upaya suksesnya penggalangan *Dana Punia* melalui organisasi social kemasyarakatan. sehingga jalan alternative untuk melakukan komunikasi melalui organisasi *wilayah umat*.

Organisasi social keagamaan ini tidak bisa menjebatani karena tidak semua umat Hindu di wilayah Kota Semarang bergabung dalam organisasi *wilayah umat*. Dalam keanggotaan ini, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi adalah membayar iuran/sumbangan yang besaran nominalnya berbeda antara *wilayah umat* yang satu dengan yang lain. Penggalangan *Dana Punia* melalui organisasi *wilayah umat* merupakan system yang strategis dalam upaya meningkatkan kesadaran umat Hindu untuk mengamalkan ajaran agama.

2) *Dana Punia* Melalui Pengajuan Proposal.

Penggalangan *Punia* dengan mengajukan proposal ditujukan kepada Donatur dan, Instansi Pemerintah/Swasta. Seperti contoh pada saat pelaksanaan Melasti dan Hari Raya Nyepi tahun 2011, panitia Kota Semarang dengan rencana mengajukan proposal kepada calon donator, kurang mendapatkan respon. Pengajuan proposal untuk pembangunan pura ataupun untuk upacara di pura, terkadang berhasil terkadang tidak, tergantung kepada siapa yang mengajukan dan siapa yang mengajukan.

Pengajuan proposal kepada para donator mungkin disebabkan karena donator merasa berulang kali sebagai obyek penggalangan *Punia* ataupun kurang pedulinya terhadap kegiatan tersebut. Keberhasilan penggalangan *Punia* melalui instansi pemerintah, tergantung pada system yang ada pada instansi tersebut, seperti tersedianya post anggaran dan kebijakan aparat pemerintah setempat. Pada saat mengalokasikan anggaran kegiatan keagamaan, kebijakan sangat menentukan. Post anggaran kegiatan setiap agama, sesuai dengan amanat undang undang terwadai, tetapi terwujud dan tidaknya tergantung dari pembuat kebijakan.

3) *Dana Punia* Melalui Sesari Banten

Masyarakat Hindu kota Semarang sudah menjadikan tradisi dalam setiap kegiatan persembahyangan selalu menghaturkan banten, yang dilengkapi dengan canang. Canang dengan berbagai kelengkapannya yang termasuk didalamnya terdapat uang/sari banten. Besaran nilai sari banten tidak ditentukan. Sari Banten secara filosofis sebagai pelengkap sarana upacara. Makna sari banten/uang, sering muncul dalam mantra-mantra upacara, seperti mantra untuk menghaturkan *Segehan*. Adapun mantranya yaitu:

Sang Hyang Purusangkara.....manusa aweh tadah saji sira watek Kala Bhuta kabeh. Iti tadah sajinira sega iwak sambel. Asing kirang luput nyata pipis sabundel patukuna sira ring pasar agung. (Ny. Putra.1982)

Artinya, Wahai Sang Purusangkara..... Manusia menghaturkan santapan sesaji (untuk) semua Kala Buta. Makanlah ini sesaji nasi dan lauk sambal. Apabila kurang ini sejumlah uang belilah (makanan) di Pasar Besar.

Menyurut (ambil) kembali sari/uang sudah menjadi tradisi untuk dapat dipergunakan keperluan lainnya. Sari/uang yang di *surut* tersebut dikumpulkan menjadi dana/kas milik umat Hindu. Sari Banten yang terkumpul biasanya dibagi untuk kepentingan pura dan sebagian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi social keagamaan seperti organisasi keagamaan pemuda Hindu. Kwantitas sari banten di Kota Semarang, tergantung dari moment ritual yang dilaksanakan. Ketika persembahyangan hari raya Galungan, di Pura Girinatha bisa mencapai tiga juta rupiah, tetapi pada hari Purna maupun Tilem berkisar angka ratusan ribu rupiah. Di pura lain seperti pura Amerta Sari dan Saraswati yang ketiganya berlokasi di kawasan kota Semarang besaran Sari banten tidak sebanyak di Girinatha. Hal ini disebabkan Girinatha merupakan pusat kegiatan hindu di Semarang, terlebih di pura Manggala Dharma dan Satya Dharma yang lokasinya dipinggir kota Semarang, besaran banten jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pura yang ada di pusat kota.

4) Dana Punia melalui Kotak Punia Di Pura

Umat Hindu di Kota Semarang tidak terbiasa atau tidak pernah melakukan penggalian *Dana Punia* melalui kotak *Punia* yang diletakkan di jalan-jalan raya ataupun ditempat keramaian seperti di rumah makan/toko. Kotak *Dana Punia* cukup dipasang dilingkungan pura. Cara ini tidak sekedar untuk mengumpulkan uang, tetapi sekaligus menjarang dan meningkatkan kesadaran umat Hindu di Kota Semarang dalam rangka menyalurkan *Punia* harta milik pribadinya. Hasil yang diperoleh dari kotak *Dana Punia*, sangat bervariasi. Pada bulan-bulan tertentu isi kotak *Punia* pura Girinatha dalam kurun satu bulan bisa terkumpul tujuh ratus ribu, misalnya pada saat dilaksanakan kegiatan *pasraman*.

Akan tetapi pada saat liburan sekolah perolehan *Dana Punia* menurun jumlahnya. Biasanya para anggota masyarakat Hindu di Kota Semarang yang tidak pernah menghadiri kegiatan arisan *Tempek*, dengan kesadarannya sendiri berkenan mengisi kotak *Punia* dengan jumlah yang agak besar, sedangkan orang yang sering mengikuti kegiatan di pura, mengisi kotak *Punia* relatif kecil, tetapi volumenya lebih tinggi. Lagi pula umat yang sering mengikuti kegiatan di pura relatif lebih banyak mengeluarkan biaya. Penggalangan *Punia* melalui kotak *Punia* dirasakan sangat efektif, sehingga teknik ini masih dilaksanakan sampai saat ini.

5) Dana Punia melalui Retribusi

Penggalangan *Punia* ini sangat kecil, mengingat kegiatan bidang jasa perdagangan yang bisa dikelola adalah lapak-lapak (ada 7 lapak/kios) penjualan di lingkungan Pura Girinatha. Parisada Semarang hanya memiliki jasa restribusi kusus di lingkungan Pura Girinatha. Pura Girinatha memiliki areal yang bisa dimanfaatkan umat untuk berdagang pada saat ada kegiatan di pura, seperti kegiatan umat hari Minggu ataupun pada saat hari raya. Besaran retribusi tidak ditentukan tetapi tergantung dari kesadaran para pemakai lapak.

6) Dana Punia melalui Undian Kopon Berhadiah

Penggalangan *Dana Punia* melalui kupon berhadiah pernah dilakukan pada tahun 2006 pada saat kegiatan Ngenteg Linggih Pura Girinatha. Panitia menyediakan undian kupon berhadiah untuk merangsang umat Hindu dalam melaksanakan *Punia*. Kupon berhadiah perlembar dengan harga lima ribu rupiah. Asumsi Rencana penerimaan seratus lima puluh juta rupiah, dengan jumlah penjualan tiga puluh ribu lembar yang terjual tidak lebih dari tujuh ribu lembar. Walaupun kegiatan ini belum menunjukkan kesuksesan panitia menggalang *Punia* umat Hindu, tetapi perlu diberikan apresiasi. Bahwa segala upaya pernah dilakukan untuk menggalang *Punia* sebanyak-banyaknya. Menggalang *Punia* tersebut dilaksanakan untuk mendorong pembangunan pura Girinatha segera selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

7) Dana Punia Sistem Lelang

Penggalangan *Punia* dengan sistem “lelang” dilakukan untuk menggalang kebutuhan pembangunan pura maupun upacara agama. Pembangunan pura yang diprogramkan oleh panitia pembangunan dengan menyampaikan berbagai butir kebutuhan fisik pura. Begitu juga panitia piodalan juga menampilkan item-item kebutuhan sarana upakara. Dari hasil pengamatan terhadap pertemuan langsung yang telah penulis lakukan tampak, bahwa panitia piodalan yang sering lebih banyak dapat mengumpulkan *Punia* dengan model lelang dibanding dengan panitia pembangun pura. Panitia piodalan biasanya mendapatkan *Punia* dengan cara menawarkan kepada warga pada saat pertemuan warga *Tempek*. Warga *tempek* ada yang secara sukarela menawarkan menyumbang kebutuhan sarana ritual seperti ayam, buah, banten Pajegan, kain, dupa dan sebagainya (wawancara Bp Nyoman Romangsi tanggal 19 Juni 2011).

Catatan hasil observasi menunjukkan, bahwa 90% sarana upakara yang dibutuhkan untuk ritual disanggupi oleh umat. sebaliknya butir-butir kebutuhan untuk pembangunan pura sering kurang mendapat respon yang cepat dari warga. Item-item kebutuhan untuk pembangunan pura diperoleh dari simpatisan Hindu, bukan dari umat Hindu semarang. Selain itu sumbangan juga berasal dari umat Hindu di luar Kota Semarang. Sumbangan yang diperoleh dari para simpatisan Hindu biasanya didahului dengan mengajukan proposal. Selain sumbangan dalam bentuk dana pembangunan, ada juga simpatisan yang menyumbang dalam bentuk material/ bahan bangunan. Para penyumbang tersebut biasanya adalah orang-orang yang berhasil usahanya berkat adanya pura. Umat Hindu dari luar Kota Semarang menyumbang karena pernah berdomisili di Semarang dan berhasil dalam meniti karier atau berhasil bidang usaha jasa tertentu.

III. PENUTUP

Strategi *Punia* merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menggali dana untuk kegiatan social keagamaan Hindu dan menjadi suatu tata nilai yang melekat pada kehidupan keagamaan Hindu di Semarang yang dapat membangun prinsip-prinsip kehidupan social keagamaan Hindu yang menyatu dengan jiwa umat Hindu. Penggalangan *Punia* untuk kebutuhan kegiatan ritual dan kegiatan sosial keagamaan umat Hindu di Semarang mencerminkan dua sikap yang berbeda. Penggalangan *Punia* untuk kegiatan ritual agama akan lebih mudah/berhasil jika dibandingkan untuk kegiatan social keagamaan. Penggalangan *Punia* dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui iuran, pengajuan proposal, sari canang, kotak *Punia*, restribusi. Lembaga / Badan Dharma Dana Nasional yang menurut keputusan parisada sebagai regulasi dan manajemen *Dana Punia* belum terlaksana, karena di Kota Semarang belum terbentuk. Ketidakhadiran lembaga tersebut tidak menyurutkan kesadaran

ber *Punia*. Kesadaran dan kepedulian ber*Dana Punia* bagi umat Hindu menjukan sikap antusias umat dalam mengamalkan ajaran agama.

Daftar Pustaka

Annur, Fauzi (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan (Studi Kasus di SDIT Nur Agus, Bustanudin 2006. Agama Dalam kehidupan Manusia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mas Putra. Ny. I Gst Ag 1982. Upakara Yadnya.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2002. Komplikasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2006. Hasil-hasil Mahasabha IX Parisada

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2009. Hasil-hasil Pesamuan Agung Parisada Tahun 2009.

PGAHN 6 Th Singaraja.1986.Nitisastra Dalam bentuk Kakawin.Proyek Penerangan dan Bimbingan Dakwah Agama Hindu dan Budha.

Setia,Putu 2002. Dana Punia. Denpasar; Raditya: Majalah Hindu No.61 Agustus 2002.

Suseno. Franz Magnis.1991.Etika Jawa. Jakarta. PT.Gramedia.

Robertson, Roland.1995. Agama Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi.Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Wiana. I Ketut.2000. Makna Agama Dalam Kehidupan. Denpasar. PT. BP